

ABSTRAK

ANALISIS EFISIENSI ALOKASI BELANJA MODAL DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN MALAKA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi alokasi belanja modal dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Belanja modal merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pengeluaran daerah yang diarahkan untuk membiayai penyediaan aset tetap, seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung pelayanan publik, peralatan dan mesin, serta sarana pendukung lainnya. Dalam konteks pembangunan daerah, belanja modal memiliki peranan yang sangat strategis karena berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas layanan publik dan percepatan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pengelolaan belanja modal dilakukan secara efisien agar anggaran yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal dan menghasilkan output yang maksimal.

Kabupaten Malaka sebagai daerah otonom yang masih tergolong muda memiliki kebutuhan pembangunan infrastruktur yang sangat besar. Pemerintah daerah dituntut untuk mampu memanfaatkan belanja modal secara efisien guna mengejar ketertinggalan infrastruktur dibandingkan dengan daerah lain. Namun, dalam pelaksanaan APBD, seringkali terjadi deviasi antara alokasi dan realisasi belanja modal. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam efisiensi penggunaan anggaran, baik karena faktor perencanaan yang belum matang, kapasitas pelaksana kegiatan yang terbatas,

maupun hambatan administratif dan teknis di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk melihat lebih dalam sejauh mana belanja modal telah dikelola secara efisien dan apakah alokasi tersebut benar-benar mendorong pembangunan infrastruktur secara nyata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis data sekunder. Data diperoleh dari dokumen resmi seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2021–2026. Analisis efisiensi dilakukan dengan menggunakan rasio efisiensi menurut Mahmudi, yaitu membandingkan antara realisasi dan alokasi anggaran belanja modal yang kemudian diklasifikasikan ke dalam empat kategori: sangat efisien ($\leq 80\%$), efisien (81%–90%), cukup efisien (91%–100%), dan tidak efisien ($> 100\%$). Selain itu, dilakukan analisis pertumbuhan belanja modal dari tahun ke tahun serta analisis terhadap struktur belanja berdasarkan jenis aset yang dibiayai.

Hasil analisis menunjukkan bahwa selama periode 2019 hingga 2024, efisiensi belanja modal Kabupaten Malaka secara umum berada dalam kategori sangat efisien hingga efisien. Pada tahun 2019, rasio efisiensi mencapai 79,85 persen, yang menandakan bahwa belanja modal digunakan secara sangat efisien. Tahun 2020 dan 2021 juga menunjukkan tren serupa dengan efisiensi masing-masing 79,35 persen dan 74,33 persen. Meski hal ini menunjukkan pengendalian anggaran yang baik, efisiensi yang terlalu tinggi bisa juga menunjukkan rendahnya tingkat penyerapan anggaran dan tidak

terlaksananya sebagian program pembangunan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat mungkin belum sepenuhnya terpenuhi.

Pada tahun 2022, rasio efisiensi mulai menunjukkan perbaikan dengan nilai 86,55 persen, masuk dalam kategori efisien. Tahun 2023 dan 2024 mencatat efisiensi yang lebih tinggi, yakni masing-masing 93,10 persen dan 94,70 persen. Angka ini menunjukkan peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola belanja modal secara lebih baik, dengan realisasi anggaran yang semakin mendekati alokasi. Namun demikian, rasio yang mendekati 100 persen tetap perlu dicermati agar tidak terjadi pemborosan, terutama jika pencapaian fisik tidak sejalan dengan besarnya anggaran yang digunakan.

Dari sisi pembangunan infrastruktur, belanja modal diarahkan terutama untuk sektor jalan, jaringan irigasi, gedung sekolah dan puskesmas, serta peralatan dan mesin penunjang layanan publik. Berdasarkan analisis data, pembangunan jalan dan jembatan mendominasi belanja modal infrastruktur, disusul oleh bangunan gedung negara. Peningkatan realisasi pada sektor ini menunjukkan adanya prioritas pembangunan pada konektivitas wilayah dan pelayanan dasar. Namun, ditemukan pula bahwa beberapa sektor seperti irigasi dan peralatan mengalami deviasi realisasi, menunjukkan adanya kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan atau penyesuaian anggaran di tengah tahun berjalan.

Selain efisiensi, penelitian ini juga menganalisis pertumbuhan belanja modal. Ditemukan bahwa pertumbuhan belanja modal mengalami fluktuasi. Tahun 2020 mengalami penurunan akibat dampak pandemi COVID-19 yang memaksa realokasi anggaran untuk belanja tak terduga dan penanganan kesehatan. Sementara itu, tahun 2023 menunjukkan lonjakan signifikan, yang mencerminkan adanya program strategis nasional maupun prioritas daerah yang membutuhkan belanja modal dalam jumlah besar. Namun, peningkatan anggaran belum sepenuhnya menjamin tercapainya infrastruktur yang berkualitas dan merata, sehingga efisiensi perlu dikaitkan pula dengan hasil pembangunan yang nyata dan berdampak.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa efisiensi anggaran perlu disertai dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang disiplin, dan evaluasi yang ketat. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem penganggaran berbasis kinerja, di mana belanja modal diarahkan untuk menghasilkan output dan outcome yang jelas dan terukur. Selain itu, sinergi antarperangkat daerah serta keterlibatan masyarakat dalam penyusunan prioritas belanja sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan dan kondisi lokal. Efisiensi bukan hanya persoalan angka perbandingan antara realisasi dan anggaran, tetapi juga mencakup kualitas hasil, manfaat sosial, dan keberlanjutan dari infrastruktur yang dibangun.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademis dalam kajian efisiensi keuangan daerah, khususnya pada aspek belanja modal dan hubungannya

dengan pembangunan infrastruktur. Temuan-temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengelolaan anggaran yang lebih baik. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambahkan analisis kualitas infrastruktur pascarealisasi, maupun menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali faktor-faktor non-anggaran yang mempengaruhi efisiensi belanja modal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efisiensi alokasi belanja modal di Kabupaten Malaka secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam aspek kualitas, pemerataan, dan perencanaan pembangunan. Pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas fiskal guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dapat menghasilkan infrastruktur yang fungsional, berdaya guna, dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: **efisiensi alokasi belanja modal, pembangunan infrastruktur**